

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas penanganan Covid 19 di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penegak hukum protokol kesehatan Covid 19. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, peneliti menggunakan informasi Pejabat, pasukan, dan staf di lingkungan satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat langsung baik dalam penyusunan anggaran maupun tugas dilapangan. Sumber data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan petugas dilapangan dan staf di kantor. Informan dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi arsip. Akuntabilitas penanganan Covid 19 terdiri dari: akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas anggaran, akuntabilitas data dan akuntabilitas hukum. Penerapan akuntabilitas penanganan Covid19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan perumusan kebijakan penanganan Covid 19 yang linier dengan aturan di atasnya, pengajuan anggaran yang akuntabel sesuai dengan arahan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyajian data pelanggaran protokol kesehatan yang akuntabel dengan menggunakan aplikasi JOGJA PATUH, penegakan hukum protokol kesehatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur dan pertanggungjawaban kegiatan langsung pada masyarakat melalui media sosial.

Kata Kunci : Akuntabilitas, kebijakan, anggaran, data dan hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how far the accountability for handling covid-19 in Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta civil service as law enforcement on handling covid-19 health protocols. The type of this research are qualitative, authors using the information from officials, troops and staff from Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta which directly involved on financial planning and also field work. The data origin using data primer, means, data that obtained directly from Satuan Polisi Pamong Praja's officials. The informant selected by purposive sampling. Collecting data technique by interview and archives documents.

The accountability of handling covid-19, consist of; policy accountability, data accountability and law accountability. Accountabilities application on handling covid-19 by Satuan Polisi Pamong Praja performed with formulation policy that is linear with the rules above, budgeting application on handling covid-19 in accordance with Tim Anggaran Pemerintah Daerah, data servings of the offenders health protocols using JOGJA PATUH application, to enforce the regional regulations which is suitable with standart operational procedure and activity responsibilities direct from society by social media.

Key Words: *Accountability, Policy, budget, data, law*